

BAB III

KONFLIK ROHINGYA DAN DESAKAN MALAYSIA

Konflik Rohingya adalah konflik kemanusiaan yang dialami oleh suatu etnis beragama Islam yang bernama etnis Rohingya. Mereka awalnya tinggal dan telah menetap lama di wilayah Myanmar sejak sebelum Myanmar berdiri, tepatnya saat wilayah mereka masih bernama Arakan dan bukan Rakhine seperti sekarang ini. Selama konflik ini, etnis Rohingya selalu mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah Myanmar. Mereka juga banyak diserang secara fisik oleh masyarakat etnis Budha disana termasuk para pemimpin agama Buddha yang juga sangat bersikap keras kepada mereka hingga banyak dari warga beretnis Rohingya yang merengas nyawa ditanah mereka sendiri. Desa-desa mereka dihancurkan. Pemerksaan yang dialami oleh kaum wanita Rohingya juga telah terjadi. Dengan begitu banyaknya kesewenang-wenangan, kekerasan fisik, pembunuhan, pemerksaan, penghancuran rumah-rumah dan properti-properti mereka yang mereka alami membuat mereka memilih untuk berusaha keluar dari Myanmar. Gelombang pengungsi yang berjumlah ratusan ribu jiwa dari etnis Rohingya ini menyebar ke berbagai wilayah di negara-negara tetangga Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan kebanyakan menuju Bangladesh.

Malaysia sebagai negara yang turut terdampak akibat konflik ini kemudian melakukan banyak usaha untuk menghentikan konflik yaitu dengan mendesak pemerintah Myanmar agar berusaha keras untuk menangani konflik ini secara cepat dan tuntas.

A. KRONOLOGI KONFLIK ROHINGYA

Konflik Rohingya merupakan konflik yang cukup menyita perhatian dunia saat ini, baik itu pada tingkat negara-bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan regional seperti ASEAN, para akademisi, bahkan media internasional juga menyoroti tentang hal ini. Konflik ini terjadi dan dialami oleh

suatu kelompok etnis bernama etnis Rohingya yang merupakan penganut agama Islam, dan mereka menetap di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Mereka mengalami diskriminasi secara terstruktur, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan hak-hak, penghancuran kampung-kampung mereka, juga dimusuhi oleh pemerintah Myanmar dan mayoritas masyarakat Myanmar yang beragama Buddha. Oleh karena itu, etnis Rohingya yang awalnya menetap di Myanmar, terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka itu dan mengungsi ke berbagai wilayah negara-negara disekitarnya. Orang-orang tua, dewasa, pemuda, wanita, anak-anak, balita, bahkan bayi dari etnis Rohingya ini menghadapi berbagai tantangan dalam pelarian mereka untuk keluar dari Myanmar. Usaha pelarian mereka itu mendapat hambatan dari otoritas Myanmar sendiri yang berjaga-jaga didekat perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Dalam perjalanan mereka keluar dari Myanmar, orang-orang etnis Rohingya ini tak sedikit yang merengang nyawa. Jalur pelarian yang mereka gunakan antara lain sungai dan bahkan ada yang mengarungi laut. Ratusan ribu orang dari etnis Rohingya ini terpecah ke berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan mayoritas pengungsi berada di Cox's Bazar, Bangladesh. Kehidupan mereka di dalam wilayah pengungsian yang berada di Cox's Bazar tersebut tentu sangat serba terbatas. Berdasarkan berbagai macam penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa menobatkan mereka sebagai etnis yang paling teraniaya didunia.

Rohingya adalah sebuah nama untuk menyebut suatu etnis yang beragama Islam, mendiami negara bagian Rakhine, Myanmar. Terdapat dua versi yang menjelaskan asal-usul etnis Rohingya. Pertama, mereka sudah mendiami wilayah itu jauh sebelum negara Myanmar berdiri. Mereka adalah keturunan dari bangsa Arab, Persia, Tukri, Mughal dan Bengal yang datang ke wilayah Rakhine, Myanmar yang dulu disebut Arakan sebagai pedagang, tokoh agama, dan pejuang. Kedua, Pemerintah Myanmar, masyarakat Myanmar lainnya termasuk

penduduk lokal Rakhine yang bukan pemeluk agama Islam secara umum menolak untuk menyebut mereka Rohingya dan lebih menggunakan nama *Bengalis* atau *Chittagonian* karena dianggap bukan penduduk asli Myanmar. Etnis Rohingya dianggap sebagai orang-orang imigran yang saat masa lampau datang ke wilayah Rakhine selama Pemerintahan Inggris masih berkuasa disana²². Walaupun sebenarnya di Myanmar, tidak hanya etnis Rohingya yang beragama Islam, tetapi juga ada etnis lain seperti etnis Bamar, Zerbadee, Panthay, Kaman, Tambukia, Mrohaung, dan Myay Du²³.

Untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan konflik Rohingya ini bisa terjadi, maka kita harus melihat lebih detail tentang masa lalu mereka antara lain seperti masa lalu tentang asal-usul mereka, masa lalu tentang hal-hal penting yang mereka alami, dan masa lalu tentang proses yang menyebabkan mereka terlibat dalam konflik dan akhirnya banyak dari kalangan mereka yang menjadi korban dalam konflik tersebut, hingga mereka dinobatkan oleh PBB sebagai etnis paling teraniaya didunia dan menyebabkan mereka harus mengungsi ke negara-negara tetangga disekitar Myanmar.

Asal-usul mereka berawal jauh sebelum berdirinya negara Myanmar. Rohingya adalah keturunan penduduk Muslim yang tinggal di Arakan jauh sebelum Inggris menguasai Myanmar dan Arakan. Hal itu dibuktikan dengan adanya dokumen sejarah yang ditulis oleh Francis Buchanan di tahun 1799 yang mana dia menggunakan istilah Rooinga(saat ini disebut Rohingya) sebagai penduduk Muslim

²² Hyuk Kim, 'A Complex Crissis: The Twisted Roots of Myanmar's Rohingya Conflict', *Global Asia*, Vol 12, No 3, 2017, h. 107.

²³ Bilveer Singh, 'ASEAN, Myanmar and the Rohingya Issue', *Himalayan and Central Asian Studies*, Vol 18, Nos. 1-2, 2014, h. 7.

di Arakan²⁴. Banyak orang-orang Arab, Turki, Persia, Mughal, dan Bengal yang datang ke wilayah Myanmar yang dulunya disebut Arakan, wilayah Arakan masuk dalam wilayah Kerajaan Arakan Budha. Mereka datang sebagai pedagang, tokoh agama, dan pejuang yang kemudian tinggal dan menetap di Arakan, berbaaur bersama penduduk asli Arakan. Hingga akhirnya muncullah masyarakat Muslim Arakan²⁵. Pada abad ke-12, masyarakat Muslim Arakan memiliki hubungan dekat dengan Raja Bengal yang kemudian gelombang Islamisasi muncul hingga abad ke-17, namun toleransi antar umat beragama saat itu berlaku. Ketika Raja Burma menguasai Arakan, terjadilah pembantaian dan penetapan kerja paksa. Akibat hal itu terjadilah gelombang perpindahan pertama secara besar-besaran ke Bengal yang merupakan wilayah Koloni Inggris²⁶.

Hingga akhirnya Inggris melakukan kolonialisasi terhadap wilayah Burma. Kemudian membentuk unit administratif dibidang teritorial dan etnis, Inggris juga membentuk kondisi sosial dan politik. Pada tahun 1823, terjadilah perpindahan besar-besaran masyarakat India Muslim yang dilakukan oleh Inggris menuju Arakan dalam rangka untuk menjadi tenaga kerja perkebunan dan dermaga di wilayah kolonial Burma dan mereka rela dibayar lebih rendah dari upah masyarakat Burma pada umumnya²⁷. Hal ini

²⁴ Hariati Ibrahim dan Rohaida Nordin, 'The Principle of Responsibility to protect: The Case of Rohingya in Myanmar', *Pertanika Journal Social Sciences & Humanities*, 23, 2015, h. 4.

²⁵ Kim, *Loc.Cit.*

²⁶ Stefan Bepler, 'The Rohingya Conflict: Genesis, Current Situation and Geopolitical Aspects', *Pacific Geographies*, #50, 2018, h. 5.

²⁷ *Ibid*

memicu perasaan benci pada masyarakat Burma yang beragama Budha karena mereka dipaksa keluar dari lapangan pekerjaan mereka yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kebijakan Inggris berupa *Divide et Impera* (*divide and rule*) juga menjadi alasan dan sebab kunci dari adanya ketegangan antara etnis saat itu. Kelompok etnis dan keagamaan yang bersedia loyal kepada Inggris akan lebih disukai Inggris untuk masuk kedalam militer dan lebih disukai untuk ditunjuk untuk mengisi posisi senior dalam pemerintahan²⁸. Pada tahun 1920-an muncullah hukum pernikahan sebagai hal yang kembali memicu ketegangan antara masyarakat Budha dan masyarakat pendatang India yang Muslim. Kemudian pada 1930-an pecahlah kerusuhan antara masyarakat Budha dan Muslim dikarenakan sengketa berkepanjangan tentang hukum pernikahan tersebut, ditambah lagi dengan kebencian masyarakat Budha yang merasa lapangan pekerjaan mereka dirampas oleh masyarakat pendatang Muslim India dan kesulitan secara sosial dan ekonomi mereka yang meluas diakibatkan oleh kondisi penurunan ekonomi dunia pada 1930-an. Kerusuhan itu diawali dengan konflik yang terjadi antara pekerja dermaga Burma dan India. Konflik ini menyebabkan terjadinya kekejaman yang sangat parah. Orang-orang dari kedua belah pihak mengalami kekejaman berupa isi perut mereka dikeluarkan dari tubuh dan anggota badan mereka dipotong-potong dengan pisau dan kapak. Para wanita dan anak-anak dari kedua belah pihak juga mengalami kekejaman. Hal-hal itu membuktikan adanya kebencian antara masyarakat Muslim India dan masyarakat Burma. Pada tahun 1938 pecah kembali kerusuhan sebagai rangkaian lanjutan dari kerusuhan pada 1930 yang langsung menargetkan kekerasan terhadap Muslim. Kerusuhan tersebut terjadi karena terus meningkatnya ketegangan atas isu hukum pernikahan. Koran-koran disana juga menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap Muslim karena mereka dianggap mengambil kekayaan masyarakat Burma dan juga kekayaan dari anak-anak perempuan dan

²⁸ *Ibid*

saudara-saudara perempuan masyarakat Burma. Dalam aksi yang dilakukan masyarakat Budha, mereka menginginkan adanya hukuman yang diberikan kepada masyarakat Muslim, mereka juga menginginkan agar pemerintah untuk membentuk organisasi masyarakat sipil dan menjamin harta dari kaum perempuan Budha yang diperistri oleh Laki-laki Muslim. Hasutan dari koran-koran tersebut dan publikasi dari aksi yang dilakukan masyarakat Budha juga menjadi penyebab dari kerusuhan pada 1938. Kerusuhan tersebut menyebabkan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak, sebanyak 113 masjid juga dibakar. Setelah kerusuhan tersebut terjadi, investigasi yang dilakukan oleh Gubernur melalui Komite Penyelidikan menghasilkan adanya usulan dari dua Legislator Inggris, dua perwakilan Masyarakat Budha Burma, dan dua pemimpin masyarakat Muslim untuk membatasi pengiriman tenaga kerja dari India. Pemerintah India dan Burma melakukan perjanjian indo-Burma Immigration Agreement pada 1941 yang berisi pembatasan terhadap masyarakat India ke Burma. Namun perjanjian tersebut tidak memiliki dampak apapun karena Jepang mulai memduduki Burma pada 1942²⁹.

Kemudian kerusuhan kembali pecah untuk yang ketiga kalinya antara orang-orang Budha Arakan dan Muslim. Pemicu dari kerusuhan dan kekerasan ini terjadi karena tuntutan berkepanjangan dari memburuknya kondisi sosial-ekonomi seperti pada kerusuhan sebelumnya di tahun 1938. Akibat dari kekerasan ini menjadikan banyaknya rumah orang-orang Muslim yang terbakar, ratusan ribu orang Muslim lari ke arah utara Arakan, bahkan ada yang melarikan diri hingga melewati perbatasan menuju India. Orang-orang Arakan Budha di utara Arakan yang mengetahui bahwa banyak Muslim yang menuju utara Arakan, mereka kemudian juga bermigrasi ke arah

²⁹ Mary Kate Long, 'Dynamics of State, Sangha and Society in Myanmar: A Closer Look at The Rohingya Issue', *Asian Journal of Public Affairs*, Vol 6, No 1, h. 83.

selatan Arakan. Dari hal ini maka terjadilah pemusatan penduduk dari kedua belah pihak, Muslim Arakan berada di wilayah utara Arakan sedangkan orang-orang Budha Arakan berada di bagian selatan Arakan³⁰. Inggris berupaya untuk mundur dari Burma karena Jepang mulai berusaha menduduki Burma. Namun, Inggris yang walaupun hampir menemui keruntuhannya di Burma kemudian mempersenjatai simpatisan Muslim yang masih loyal kepada mereka – etnis Rohingya termasuk didalamnya – dan membentuk mereka kedalam pasukan bernama V Force yang bertujuan untuk memperlambat atau bahkan untuk menghentikan pendudukan Jepang di Burma. Simpatisan Muslim ini juga dijanjikan akan diberikan area khusus di Barat Daya Arakan oleh Inggris yang bernama *Muslim National Area*. Sementara dari Pihak orang-orang Budha Arakan memihak Jepang dan dipersenjatai oleh *Burma Independence Army* pimpinan Aung San. Kedua kelompok tersebut kembali berseteru secara fisik yang mengakibatkan adanya pembantaian brutal dan Rohingya juga banyak yang menjadi korban. Pada saat yang sama, telah terjadi banyak perpindahan penduduk dari Chittagong, menjadikan penduduk Muslim di Barat Daya Arakan bertambah pesat³¹. Jepang akhirnya mampu menduduki Burma. Jepang menempatkan orang-orang etnis Burma kedalam posisi administrasi dan menghapus perlindungan kepada etnis-etnis minoritas yang akhirnya menjadikan adanya serangan berdarah antara *Burma Independence Army* dan minoritas. Ketika Aung San dan U Nu memimpin Burma, status wilayah *Muslim National Area* yang diberikan Inggris ke Rohingya dihapuskan. Kemudian organisasi Muslim yang dipimpin Rohingya bertemu Jinnah – orang yang akan menjadi Perdana Menteri Pakistan pada tahun 1947 – untuk menyatukan Barat Daya Arakan menjadi *Muslim State of Pakistan*, namun ditolak oleh Jinnah dan Aung San. Pada

³⁰ *Ibid*

³¹ Bilveer Singh, *Op.Cit.*, h. 8.

tahun 1948 Burma akhirnya merdeka dan dipimpin oleh Aung San. Namun kelompok *Mujahid* kembali muncul dikarenakan adanya keyakinan pada mereka bahwa umat Muslim secara umum dan etnis Rohingya secara khusus mengalami penganiayaan, maka mereka melancarkan perjuangan untuk berpisah dan membuat negara Muslim sendiri, namun angkatan bersenjata orang-orang Burma berhasil membuat mereka menyerah dan tindakan aniaya terhadap Rohingya belum berakhir sejak saat itu. Perlu diingat juga bahwa gerakan Mujahid tersebut tidak merepresentasikan semua Muslim di Arakan, dan walaupun banyak dari mereka adalah mantan pemimpin V Force namun tidak mendapat dukungan dari para pemimpin Rohingya. Kemerdekaan Burma bisa terjadi karena mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok etnis yang ada termasuk minoritas seperti Rohingya. Pada saat itu juga, Perdana Menteri U Nu dan kemudian Perdana Menteri U Ba Sue mengakui Rohingya sebagai etnis didalam Burma sebagai langkah untuk menghentikan konflik pasca kemerdekaan Burma³².

Pemerintahan Burma saat itu didominasi oleh etnis Burma, dan kaum-kaum etnis minoritas melihat adanya pelanggaran terhadap janji Aung San kepada mereka, dan kaum-kaum minoritas tersebut merasa bahwa identitas mereka sedang terancam. Akhirnya kembali terjadi konflik didalam negara Burma yang baru saja merdeka, hampir semua etnis minoritas berani melawan pemerintahan yang ada saat itu. Pihak Militer Burma mengambil kesempatan saat konflik itu dengan berusaha melakukan kudeta pada tanggal 2 Maret 1962 guna menguasai pemerintahan dan akhirnya mereka pun berhasil. Pemerintahan yang dipimpin Militer dikepalai oleh Jendral Ne Win kemudian mencabut semua hak-hak warga sipil terhadap mereka yang melawan pemerintahan yang dipimpin militer. Ne Win juga melihat bahwa etnis Rohingya

³² Mary Kate Long, *Op.Cit.*, h. 84.

adalah musuh dan tidak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari Burma. Pada reformasi administratif tahun 1964, Myanmar menjadi negara sentralis³³. Pemerintahan Ne Win kemudian mengubah drastis kehidupan etnis Rohingya. Wilayah tempat tinggal mayoritas etnis Rohingya berada yang awalnya bernama Arakan, kemudian diubah namanya menjadi negara bagian Rakhine. Konstitusi baru Myanmar pada tahun 1974 membuat etnis Rohingya tidak dapat memiliki representasi di parlemen. Pada tahun itu juga terbentuklah organisasi *Rohingya Patriotic Front Armed Group*. Pada tahun 1977/1978, pemerintah Myanmar melakukan operasi pembersihan wilayah Myanmar dari mereka yang tidak memiliki dokumen identitas nasional, yang mana operasi itu bernama Operasi *King Dragon*. Militer melakukan tindakan yang sangat brutal kepada etnis Rohingya yang tidak memiliki dokumen identitas nasional. Hal ini menyebabkan banyaknya etnis Rohingya yang lari ke Bangladesh, terdapat sekitar 250.000 orang yang melarikan diri saat itu. Dunia internasional menyuarakan agar dilakukan tindakan konkret untuk menghadapi masalah ini. UNHCR (*United Nations Refugee Agency*) kemudian memfasilitasi perjanjian antara Pemerintah Bangladesh dan Pemerintah Myanmar yang kemudian menghasilkan suatu operasi yang dilakukan oleh Militer Myanmar yaitu Operasi *Shwe Hintha (Golden Bird)*. Operasi ini memiliki tujuan yaitu memulangkan kembali etnis Rohingya ke Rakhine, Myanmar. Tahun 1982 Myanmar mengeluarkan Hukum Kewarganegaraan. Dalam hukum ini memuat daftar nama-nama etnis yang diakui pemerintah Myanmar sebagai warga negaranya, dan sayangnya nama etnis Rohingya tidak termasuk di dalam hukum itu. Akhirnya resmi sudah etnis Rohingya menjadi etnis yang tidak diakui keberadaannya sebagai bagian dari Myanmar, dan juga akhirnya mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Konsekuensi dari status mereka yang tidak diakui sebagai

³³ Stefan Bepler, *Op.Cit.*, h. 6

warga negara Myanmar, menjadikan mereka tidak terlindungi dari kesewenang-wenangan dan perlakuan kekerasan dari polisi, militer dan otoritas Myanmar. Myanmar kembali melakukan Operasi *Phi Thaya*. Dalam operasi ini kembali etnis Rohingya mengalami perlakuan yang kejam seperti siksaan, kerja paksa, pelecehan, pemerkosaan, lahan mereka diambil secara paksa, penghancuran properti, dan eksekusi di Rakhine. Tahun 1991/1992, mulai terjadi kembali gelombang pengungsian besar-besaran etnis Rohingya ke Bangladesh. Sekitar 250.000 orang mengungsi dan kembali menetap di tenda-tenda pengungsian yang sebelumnya telah mereka tempati. Organisasi-organisasi HAM internasional dan kesehatan internasional tidak diizinkan masuk untuk membantu mereka. Mulai tahun 1991, partai-partai politik Rohingya mulai dihapuskan. Sebuah badan bentukan Myanmar yang menjaga perbatasan antara Bangladesh dan Rakhine dibentuk pada tahun 1992 yang bernama *Nat-Sat Kut-Kwey Ye (NaSaKa)*. Merekalah badan yang juga bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya. Konsekuensi lain yang dialami oleh etnis Rohingya dikarenakan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan antara lain mereka tidak memiliki hak untuk memiliki berbagai macam properti, mereka juga dilarang untuk meninggalkan desa mereka, dilarang untuk mengenyam pendidikan, tidak diizinkan untuk memiliki tempat-tempat ibadah, bahkan mereka harus meminta izin pemerintah terlebih dahulu jika ingin menikah dan memiliki anak. Etnis Rohingya juga harus menderita karena mereka hanya mampu bekerja kasar dan selalu digaji rendah³⁴.

Sejak reformasi politik terjadi pada tahun 2011, konflik didalam negeri Myanmar kembali terjadi. Pada 2012 kaum militan Buddha bernama Ma Ba Tha memicu terjadinya

³⁴ Mary kate Long, *Op.Cit.*, h. 84-85.

kekerasan terhadap Rohingya³⁵. Mei 2012, kerusuhan kembali terjadi. Isu pemicu kerusuhan yang berkembang dimasyarakat bahwa adanya pembunuhan disertai perkosaan wanita beragama Buddha yang dilakukan oleh laki-laki Muslim. Kerusuhan ini terjadi disepanjang negara bagian Rakhine. Keluarga-keluarga dari etnis Rohingya terpaksa kembali untuk bersembunyi di dekat perbatasan dengan Bangladesh untuk menghindari konflik, yang mana saat itu kemah-kemah pengungsian disana sudah sangat penuh³⁶. Kerusuhan kembali terjadi pada bulan Juni tahun 2012. Saat itu massa Arakan menyerang desa-desa yang ditinggali oleh etnis Rohingya. Kerusuhan terjadi sebagai ajang balas dendam orang-orang Buddha terhadap dugaan pemerkosaan yang dialami oleh wanita beragama Buddha oleh laki-laki dari kalangan Muslim. Kerusuhan kemudian menyebar di berbagai tempat seperti di Sittway, Maungdaw dan Buthidaung. Hal ini menyebabkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, namun korban jiwa dari etnis Rohingya lebih banyak. Pemerintah Myanmar menyatakan keadaan darurat didalam Myanmar. Human Right Watch kemudian membeberkan citra satelit yang menggambarkan kerusakan pada wilayah yang ditinggali oleh Rohingya. Akibat kerusuhan ini kerusakan terjadi dalam ruang lingkup yang luas, dengan kerusakan bangunan karena dibakar. Kekerasan dan kerusuhan yang terjadi selama Oktober 2012, Maret dan Juni 2013 mulai ditargetkan tidak hanya kepada etnis Rohingya saja namun juga seluruh minoritas Muslim secara umum di Rakhine, dan juga kerusuhan tersebut lebih terorganisir³⁷. Oktober 2012, gerombolan massa membakar seluruh desa-desa, rumah-rumah dan tempat ibadah. Selama Juni hingga Oktober 2012 sudah

³⁵ Stefan Bepler, *Op.Cit.*, h. 6.

³⁶ Mary Kate Long, *Op.Cit.*, h. 85.

³⁷ Hariati Ibrahim dan Rohaida Nordin, *Op.Cit.*, h. 5.

lebih dari seratus orang yang meninggal. Selama kerusuhan pada Oktober 2012 saja seratus lebih orang yang mengalami luka-luka, anak-anak yang lemah juga turut menjadi korban. Banyak juga yang terpuruk kondisinya didalam kemah-kemah pengungsian dengan kondisi kesehatan yang buruk serta ketersediaan makanan yang tidak mencukupi. *Human Right Watch* juga menambahkan kerusakan terjadi pada bangunan sejumlah 4.855, dan sebagian besarnya yang rusak adalah wilayah pemukiman penduduk. *United Nations Under-Secretar-General for Humanitarian Affairs*, Valerie Amos memberitahukan bahwa pengungsi di Kota Sittwe, ibu kota Rakhine selama Desember 2012 dalam kondisi yang memprihatinkan. Pengungsi didalam Kota Sittwe berjumlah sekitar 78.000, ribuan pengungsi juga ada yang berada dibagian utara negara bagian Rakhine. Mereka dalam kondisi seperti buruknya kondisi sanitasi, dan terkurung dikarenakan kondisi keamanan yang mencekam bagi mereka. Bahkan ada orang-orang Rohingya yang melarikan diri melewati perbatasan menuju negara-negara disekitarnya seperti Bangladesh, Malaysia, India, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu yang kurang memadai. Keberadaan mereka banyak ditolak oleh negara tujuan pelarian tersebut, mereka juga banyak yang diasingkan didalam tempat yang kotor, dan mereka juga menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan tidak mampu untuk kembali ke Myanmar³⁸. Maret 2013, Presiden Thein Sein memberitahukan bahwa akan menggunakan kekuatan pemaksa untuk menghentikan konflik keagamaan dan kerusuhan yang telah terjadi. Namun, tindakan Presiden Thein Sein tersebut justru membuat suasana semakin buruk. Lebih dari satu juta etnis Rohingya hidup dalam keadaan yang tidak layak. Kerusuhan kembali berkecamuk ketika pada tahun 2013 karena adanya berita pembunuhan wanita beragama Buddha. Massa kemudian meminta agar pelaku diserahkan kepada mereka, namun ditolak. Hingga

³⁸ Mary Kate Long, *Op.Cit.*, h. 85.

akhirnya konflik terjadi, massa menyerang orang-orang Muslim di Laisho³⁹.

Navi Pillay, seorang Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa terdapat pembunuhan 48 orang Rohingya selama insiden pada tanggal 9 dan 13 Januari 2014. Pillay meminta Pemerintah Myanmar untuk melakukan upaya penyelidikan terkait hal ini. Pemerintah Myanmar pun akhirnya membentuk sebuah tim penyelidik untuk mencari kebenaran terkait apa yang disampaikan oleh Pillay tersebut. Masyarakat internasional juga memperhatikan konflik ini dengan adanya usaha masyarakat internasional yang berupaya memberikan bantuan. Namun, masyarakat Myanmar umumnya memiliki perasaan benci kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan tersebut. Bahkan orang-orang dari dalam negeri Myanmar yang memberikan bantuan kepada Rohingya telah diancam jika menolong etnis Rohingya. Pada Februari 2014, organisasi non-pemerintah *Doctors without Borders* dilarang untuk ke Myanmar. Masih pada bulan yang sama, organisasi bernama Maltesar Internasional tidak diizinkan untuk melanjutkan pemberian bantuan di Myanmar. Kantor Maltesar Internasional akhirnya juga menjadi sasaran serangan dari massa Arakan, bahkan mereka juga menyerang rumah-rumah pribadi milik staf organisasi tersebut⁴⁰. Pada tahun 2014 juga terjadi penyerangan kepada pihak polisi penjaga perbatasan saat mereka berpatroli yang dilakukan oleh *Rohingya Solidarity Organization*. Penyerangan tersebut mengakibatkan meninggalnya empat orang petugas polisi.

Militer memiliki posisi yang membuat mereka memiliki kekuatan besar di dalam negeri Myanmar. Pada tahun 2008, seperempat kursi di dalam parlemen diamankan oleh militer agar pihak militer dapat mendudukinya. Mereka juga memiliki

³⁹ Hariati Ibrahim dan Rohaida Nordin, *Op.Cit.*, h. 6.

⁴⁰ Ibrahim dan Nordin, *Op.Cit.*, h. 5.

pengaruh kuat didalam tiga kementerian, serta militer tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan sipil manapun didalam Myanmar. Dikarenakan hal-hal inilah Aung San Su Kyi tidak mampu segera untuk menyelesaikan konflik Rohingya disaat konflik ini terbilang sangat genting untuk diselesaikan karena konflik ini terjadi disaat Myanmar sedang dalam masa transisi menuju era demokrasi.(untuk setelah tahun 2015)

Pada tahun 2016 sebuah organisasi bernama ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) terbentuk di sebuah tempat pengasingan di Saudi Arabia. ARSA menyangkal bahwa mereka telah melakukan kontak dengan kelompok teroris lain, namun *International Crisis Group* menegaskan bahwa mereka jelas memiliki suatu hubungan dengan kelompok teroris⁴¹. Oktober tahun 2016 dilaporkan telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) kepada polisi penjaga pos-pos pemeriksaan. ARSA berhasil membunuh beberapa petugas polisi yang sedang bertugas. ARSA menyatakan bahwa keberadaan mereka hanya untuk menjamin keselamatan etnis Rohingya dari orang-orang non-Muslim. Dalam kampanye mereka yang disampaikan lewat banyak video, ARSA jugaberusaha untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan politik dari Rohingya. Militer Myanmar merespon dengan menggunakan kekuatan luar biasa besar untuk membalas hal itu. Sehingga pecahlah kembali konflik di dalam Myanmar. Akibatnya warga-warga sipil biasa mengalami kekerasan dan kesewenang-wenangan, serta lebih dari 70.000 orang lari dari Myanmar menuju kemah-kemah di Bangladesh. Kaum-kaum militan ARSA yang tidak mampu dibasmi oleh militer Myanmar terus bergerak untuk mempersiapkan rangkaian serangan selanjutnya. Mereka merekrut pengikut-pengikut baru dari daerah-daerah terpencil disepanjang daerah Rakhine sebelah utara. Orang-orang baru tersebut diajarkan cara membuat perlengkapan penyerangan

⁴¹ Stefan Bepler, *Op.Cit.*, h. 7.

seperti membuat peledak. Pada Agustus 2017, ARSA juga melakukan penyerangan yang berakibat pada pembunuhan kepada orang-orang Rohingya yang memihak pemerintah Myanmar sebagai kepala desa, dan informan. Ratusan kepala keluarga yang mereka curigai memihak pemerintah Myanmar juga tidak luput sebagai target pembunuhan. ARSA menganggap mereka semua ini adalah pengkhianat. Tanggal 25 Agustus 2017, ARSA kembali melakukan penyerangannya secara terorganisir dan penyerangan ini merupakan kelanjutan dari penyerangan pada tahun 2016. ARSA menyerang polisi-polisi penjaga pos dan tentara-tentara penjaga. ARSA juga melakukan mobilisasi massa Rohingya laki-laki yang masih mau mengikuti mereka untuk bergabung dalam serangan saat itu. Militer Myanmar mengatakan bahwa dari pihak penyerang yang tewas berjumlah 371 orang. Militer Myanmar juga membalas serangan ARSA tersebut dengan kekuatan yang luar biasa kuat. Mereka juga mempersenjatai masyarakat lokal Rakhine sebagai cara untuk membantu dan mendampingi tentara-tentara. Militer juga menyerang warga-warga yang membantu ARSA. Konflik ini kemudian menyebabkan ratusan ribu etnis Rohingya pergi melarikan diri ke Bangladesh. Hal ini juga membuat PBB dan beberapa INGO lainnya yang melakukan pendampingan pada konflik sebelumnya terpaksa menghentikan kegiatan mereka itu dan menarik diri dari area konflik di utara Rakhine pada awal september⁴². Berdasarkan laporan dari kelompok-kelompok HAM, mereka mengatakan bahwa dalam konflik ini telah terjadi pembunuhan sewenang-wenang, pemerkosaan secara sistematis, pembakaran rumah-rumah penduduk etnis Rohingya, dan pengusiran⁴³.

⁴² Mary P. Callahan, 'Myanmar in 2017: Crises of Ethnic Pluralism Set Transitions Back', *Southeast Asian Affairs*, 2018, h. 245-247.

⁴³ Stefan Bepler, *Op.Cit.*, h. 7.

B. BENTUK-BENTUK DESAKAN MALAYSIA PADA TAHUN 2016 - 2017

Malaysia sebagai salah satu negara tujuan para pengungsi dari etnis Rohingya, sebagai tetangga Myanmar, dan sebagai sesama anggota ASEAN bersama Myanmar, melihat bahwa konflik ini harus diselesaikan. Malaysia merasa bahwa konflik ini akan berbahaya bagi kawasan Asia Tenggara. Berbagai macam potensi negatif seperti beban yang bertambah dalam hal sosial-ekonomi dari negara-negara tujuan pengungsi, prinsip-prinsip ASEAN yang mulai diabaikan oleh Myanmar, ancaman terorisme juga sangat mengkhawatirkan dan mengancam negara-negara didalam ASEAN.

Malaysia telah melakukan berbagai macam upaya desakan untuk menghentikan konflik ini. Malaysia telah menyuarkan protes terkait perlakuan Myanmar kepada etnis Rohingya, telah menyampaikan kepada Myanmar untuk menyelesaikan konflik Rohingya ini melalui forum internasional. Malaysia juga telah menghubungi dan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti PBB, ASEAN dan termasuk bekerjasama dengan pemerintah Myanmar secara langsung.

Pada tanggal 19 Desember 2016, Pemerintah Malaysia melalui Menteri Luar Negerinya menyinggung tentang konflik Rohingya ini dalam forum Menteri Luar Negeri ASEAN. Dalam kesempatan itu Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia terus memantau perkembangan dari konflik etnis Rohingya ini. Malaysia juga mengetahui bahwa Myanmar telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik ini. Malaysia bersama pihak-pihak lain seperti Indonesia dan Thailand mencoba membantu. Dalam kesempatan itu Malaysia memberikan beberapa rekomendasi untuk dilakukan oleh pemerintah Myanmar seperti: mengizinkan organisasi-organisasi kemanusiaan untuk masuk dan membantu masyarakat yang terdampak didalam area konflik; menyarankan agar seluruh anggota ASEAN membantu Myanmar untuk menyelesaikan konflik ini

bersama-sama dengan cara membantu pendampingan di Rakhine; meminta agar *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* untuk dapat masuk dan memberikan bantuan kemanusiaan; menyarankan agar ASEAN membentuk tim investigasi dan memastikan kondisi di Rakhine, serta menjadikan tim itu untuk menyediakan rekomendasi-rekomendasi bagi ASEAN untuk menyelesaikan konflik ini; menyarankan agar Myanmar untuk serius menyelesaikan konflik ini mulai dari akarnya; menginginkan agar Myanmar sadar terhadap perhatian negara-negara sahabat didalam ASEAN dan komunitas internasional; Malaysia bersedia membantu Myanmar⁴⁴.

Malaysia mengeksposisikan perhatian terhadap konflik ini juga dengan membaginya kepada Vijay Nambiar, seorang Penasihat Khusus dari UNSG yang pada akhirnya bersama banyak agensi dari PBB menyuarkan perhatian terhadap kondisi HAM yang memprihatinkan di Rakhine, Myanmar⁴⁵.

Suara desakan untuk menyelesaikan konflik ini Malaysia lakukan juga melalui forum Organisasi Kerjasama Islam pada 19 September 2017. Malaysia didalam forum ini kembali menyuarkan perhatiannya atas konflik Rohingya yang kembali pecah pada tanggal 25 Agustus 2017. Malaysia kembali menyuarkan juga untuk tetap serius membantu Myanmar dalam hal penyelesaian konflik ini. Konflik ini menurut Malaysia, dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan kawasan Asia Tenggara, sehingga Malaysia menekankan agar Myanmar serius mengatasi menyelesaikan konflik ini, meminta agar militer Myanmar untuk menghentikan tindakannya dan mengizinkan agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Myanmar, menekankan agar Myanmar mengembalikan kembali etnis Rohingya ke dalam Myanmar dengan aman dan juga mengembalikan hak-hak

⁴⁴ Aman I, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Aman I, *Loc.Cit.*

mereka, menekankan agar Aung San Suu Kyi agar menaati dan menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari *Advisory Commission on Rakhine State* yang dipimpin oleh Kofi Annan, juga mendesak agar para pelaku pelanggaran HAM yang terbukti melakukan kejahatan HAM didalam konflik itu untuk diseret ke pengadilan⁴⁶.

Bentuk desakan lain yang Malaysia lakukan yaitu dengan turut berani bersuara tentang kondisi yang memprihatinkan di Rakhine dan kondisi etnis Rohingya itu sendiri dalam keterangan terpisah mereka dari kegiatan yang sedang diikuti oleh pejabat pemerintahan Malaysia di banyak saluran informasi baik kepada media massa nasional Malaysia maupun diluar Malaysia maupun juga kepada organisasi-organisasi lainnya . Seperti dalam berita daring milik okezone.com tanggal 22 Desember 2016, Malaysia mengatakan bahwa krisis yang dialami etnis Rohingya ini jika tidak diselesaikan dengan segera, maka akan menyebabkan masalah ini meluas kemana-mana. Malaysia menambahkan bahwa banyak orang-orang Rohingya ini mengungsi dari konflik ini ke berbagai negara lain yang ada di ASEAN terutama Indonesia dan Malaysia, para pengungsi dari etnis Rohingya ini datang secara ilegal dan karena hal inilah akan membuat masalah semakin meluas. Malaysia juga mengatakan bahwa masalah ini adalah masalah bersama anggota-anggota ASEAN yang harus diselesaikan juga secara bersama. Kemudian dalam halaman website berita news.detik.com, pihak Malaysia melalui Deputy Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi memberitahukan bahwa gejolak di Myanmar telah menyebabkan banyaknya gelombang pengungsi etnis Rohingya oleh karena itu Malaysia menyerukan bahwa dunia internasional harus turut peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya ini. Dalam halaman berita channelnewsasia.com tertanggal 25

⁴⁶ Aman II, *Loc.Cit.*

September 2017, Malaysia menyampaikan desakan kepada Myanmar untuk segera merealisasikan komitmennya menghentikan konflik Rohingya ini dengan segera mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang termuat dalam laporan akhir komisi penasihat untuk Rakhine.

Malaysia kembali mendesak dengan memanggil langsung Duta Besar Myanmar untuk Malaysia. Malaysia menyampaikan protes dan perhatiannya terhadap perlakuan keras Myanmar yang terjadi di Rakhine terutama kepada minoritas Muslim dari Etnis Rohingya. Malaysia juga mengatakan bahwa serangkaian kekerasan yang terjadi telah menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar belum memiliki niat kuat untuk menyelesaikan konflik ini, dan Malaysia berniat akan mengangkat isu ini untuk disebarluaskan ke forum internasional yang lebih tinggi⁴⁷.

Pada Desember 2016, Pemerintah Malaysia memimpin aksi protes terkait konflik Rohingya dan menyampaikan banyak desakan. Najib Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia menyuarakan dan mendesak agar seluruh dunia tidak boleh diam terhadap konflik yang dialami oleh etnis Rohingya,

⁴⁷ Hanna Azarya Samosir, 'Protes Krisis Rohiingya, Malaysia Panggil Dubes Myanmar', *CNN Indonesia* (online), 6 Sptember 2017, <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170906063032-106-239721/protes-krisis-rohingya-malaysia-panggil-dubes-myanmar>>.

Najib juga mendesak agar dunia ikut menjadikan konflik Rohingya sebagai masalah bersama dan dunia harus menyelesaikan masalah ini dengan turut serta memanggil dan mendesak PBB, *International Criminal Court*, dan Organisasi Kerjasama Islam untuk melakukan sesuatu terkait konflik Rohingya⁴⁸. Najib Razak yang memimpin aksi tersebut juga menyuarakan agar negara-negara ASEAN meningkatkan tekanan terhadap Myanmar. Pemerintah Malaysia tidak akan pernah mau untuk menutup mata dan mulutnya terkait konflik Rohingya dan menyamakan opini bahwa hidup etnis Rohingya harus dilindungi dikarenakan sesama manusia dan bahwa hidup etnis Rohingya juga berharga. Dalam protes itu juga disampaikan tentang derita-derita yang dialami etnis Rohingya seperti kekerasan berdarah, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, dan mendesak agar pemerintah Myanmar menghentikan tindakan tersebut⁴⁹.

Selanjutnya masih pada tahun 2016, Upaya desakan lain dilakukan dengan cara mendesak dan memanggil negara-negara ASEAN untuk mengulas dan meninjau kembali keanggotaan Myanmar sebagai anggota ASEAN dengan sambil menyinggung tentang kekerasan dan pembersihan etnis

⁴⁸ Rozanna Latiff, 'Malaysia PM urges intervention to stop genocide of Myanmar's Rohingya Muslims', *Reuters* (online), 4 Desember 2016, <<https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-malaysia/malaysian-pm-urges-intervention-to-stop-genocide-of-myanmars-rohingya-muslims-idUSKBN13T07I>>.

⁴⁹ The Guardian, 'Malaysia PM urges world to act against genocide of Myanmar's Rohingya', *The Guardian* (online), 4 Desember 2016, <<https://www.theguardian.com/world/2016/dec/04/malaysia-pm-urges-world-to-act-against-genocide-of-myanmars-rohingya>>.

yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya⁵⁰.

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menyerukan secara langsung kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk ikut serta mengadakan aksi demonstrasi seperti yang dilakukan oleh Malaysia sebagai bentuk desakan kepada Myanmar dengan narasi yang diutarakan yaitu kewajiban untuk tetap mengamalkan isi Piagam ASEAN untuk melindungi Hak-Hak Asasi Manusia⁵¹. Dia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengajak masyarakat Indonesia agar turut serta dalam upaya penghentian konflik yang dialami etnis Rohingya ini.

Ketika tim sepakbola Malaysia dijadwalkan untuk bertanding dengan tim sepakbola Myanmar dalam laga pertandingan persahabatan untuk pemain dibawah umur 22 tahun, Malaysia menyatakan mengundurkan diri dan menolak untuk bertanding dengan Myanmar sebagai bentuk protes dan isyarat bahwa isu kekerasan terhadap Rohingya juga menjadi perhatian yang mendalam bagi pemerintah Malaysia.

Pada 2016, pemerintah Malaysia melalui Menteri Luar Negerinya, Anifah Aman mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk menjalin komunikasi langsung dengan Pemerintah Myanmar. Mereka berencana bertemu dan akan berdiskusi langsung dengan Penasihat Negara Myanmar sekaligus Pemenang Hadiah Nobel yaitu Aung San Suu Kyi. Malaysia berencana berdiskusi dengan Aung San Suu Kyi untuk membahas mengenai hal-hal apa saja yang bisa

⁵⁰ Rufki Ade Vinanda, 'Krisis Rohingya: Myanmar Larang Warganya Bekerja ke Malaysia', *Okezone.com* (online), 7 Desember 2016, <<https://news.okezone.com/read/2016/12/07/18/1561249/krisis-rohingya-myanmar-larang-warganya-bekerja-ke-malaysia>>.

⁵¹ The Guardian, *Loc.Cit.*

dilakukan oleh Malaysia dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya untuk membantu Myanmar, mencari resolusi perdamaian dan berusaha untuk menghentikan dugaan pelanggaran HAM serta berusaha menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya⁵².

Pada tahun 2017, Malaysia menunjukkan desakan secara tidak langsung yaitu dengan cara melancarkan misi bantuan kemanusiaan yang dikirimkan untuk membantu secara langsung etnis Rohingya. Misi ini dijalankan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia yang bekerjasama dengan Pemerintah Bangladesh. Bantuan di distribusikan oleh relawan-relawan Malaysia dari banyak organisasi yang bekerjasama dengan Malindo Air. Malaysia juga berencana untuk berdiskusi langsung dengan Pemerintah Bangladesh untuk membangun rumah sakit militer di area pengungsian dalam rangka untuk menjadikan penyaluran bantuan bisa lebih efektif⁵³. Bantuan yang dikirimkan yaitu berupa obat-obatan, makanan berupa biskuit dan nasi, juga kebutuhan lain seperti sabun. Selain mengirimkan bantuan, misi ini juga berusaha untuk menilai situasi di kemah-kemah pengungsian di perbatasan Bangladesh-Myanmar⁵⁴. Peluncuran misi kemanusiaan ini menandakan bahwa Malaysia menaruh perhatian mendalam atas konflik ini dan tidak setuju terhadap perlakuan pemerintah Myanmar yang begitu keras terhadap

⁵² Muzliza Mustafa, 'Malaysia Ready to Talk With Myanmar About Rohingya Abuses', *Radio Free Asia* (online), 15 Desember 2016, <<https://www.rfa.org/english/news/myanmar/malaysia-rohingya-12152016164928.html>>.

⁵³ Bernama, 'Malaysia to send humanitarian mission to help Rohingya Refugees', *The Sun Daily* (online), 8 September 2017, <<http://www.thesundaily.my/news/2017/09/08/malaysia-send-humanitarian-mission-help-rohingya-refugees>>.

⁵⁴ *Ibid*

etnis Rohingya dan juga sebagai upaya desakan secara tidak langsung kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik dan kekerasan terhadap etnis Rohingya⁵⁵.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat, selain membahas isu-isu perdagangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Najib Razak juga mengangkat isu yang dialami oleh etnis Rohingya. Najib Razak kemudian mengutarakan kondisi sesungguhnya yang terjadi di Rakhine dan etnis Rohingya, dan mengutarakan ancaman-ancaman yang terjadi jika konflik ini tidak segera diselesaikan. Hal-hal yang disampaikan Najib tersebut kepada Trump kemudian membuahkan hasil. Donald Trump mau membuka matanya lebih lebar dan mengekspos kemarahan terkait konflik yang dialami etnis Rohingya. Dia menginstruksikan bawahannya untuk mempelajari situasi di Rakhine dan mempersiapkan bantuan kemanusiaan yang dapat dikirim kesana. Hingga akhirnya, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Malaysia bersama-sama menyerukan bahwa kekerasan yang ditujukan kepada etnis Rohingya harus dihentikan⁵⁶.

Suara lantang desakan Malaysia kembali terdengar saat-saat terakhir forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang ke-11. Malaysia

⁵⁵ Muhaimin, 'PM Malaysia: Muslim Rohingya Disiksa, Diperkosa, dan Dibunuh di Myanmar', *SINDOnews* (online), 10 September 2017, <<https://international.sindonews.com/read/1238178/40/pm-malaysia-muslim-rohingya-disiksa-diperkosa-dan-dibunuh-di-myanmar-1504983183>>.

⁵⁶ Bernama, 'Najib fulfils promise, Trump wants violence against Rohingya to stop', *The Sun Daily* (online), 14 September 2017, <<https://www.thesundaily.my/archive/najib-fulfils-promise-trump-wants-violence-against-rohingya-stop-XTARCH481988>>.

menyampaikan bahwa Malaysia tidak ada sedikitpun maksud untuk mencampuri urusan dalam negeri Myanmar dalam hal ini keamanan di Rakhine, namun yang Malaysia permasalahan adalah cara pemerintah Myanmar yang bertindak keras terhadap etnis Rohingya yang telah menyebabkan banyak korban jiwa, luka-luka, dan menderita hingga banyak dari etnis Rohingya yang mengungsi keluar dari Myanmar dan merana di tenda-tenda pengungsian mereka⁵⁷.

Pada Januari 2017, kembali dalam Organisasi Kerjasama Islam tepatnya didalam forum *Extraordinary Session of the OIC Council of Foreign Ministers on the Situation of the Rohingya Muslim Mynority in Myanmar*. Dalam forum yang dihadiri oleh 42 negara menghasilkan dokumen *Resolution on the Situation of the Rohingya Muslim Minority in Myanmar* dan dokumen *Final Communique of the Extraordinary Session of the OIC Council of Foreign Ministers on the Situation of the Rohingya Muslim Minority in Myanmar*, dan tentu saja forum tersebut sepakat untuk menerapkan kedua isi dari dokumen tersebut. Inti dari kedua dokumen tersebut yaitu mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan agar bantuan-bantuan dari luar Myanmar dapat masuk, menghilangkan akar permasalahan dari konflik tersebut seperti pengakuan kewarganegaraan etnis Rohingya, pemerintah Myanmar juga didesak agar mereka mau menyediakan hak-hak dasar manusia bagi etnis Rohingya. Isi desakan juga menginginkan agar pemerintah Myanmar mengambil langkah-langkah cepat dan berkelanjutan untuk

⁵⁷ Bernama, 'Malaysia questions Myanmar's handling of Rohingya issue', *The Star Online* (online), 21 September 2017, <<https://www.thestar.com.my/news/nation/2017/09/21/malaysia-questions-myanmar-handling-of-rohingya-issue/>>.

memulangkan etnis Rohingya ke tanah mereka di Rakhine dengan aman⁵⁸.

Berani bersuara lantang kepada dunia hingga tersebar luas melalui berbagai macam media massa dan kanal-kanal berita berbagai macam organisasi, menyuarakannya pada forum-forum internasional seperti ASEAN dan OKI, menyuarakannya langsung kepada Myanmar, dan bahkan membicarakannya kepada negara kuat seperti Amerika Serikat, telah membuktikan bahwa pemerintah Malaysia memiliki perhatian yang sangat mendalam terkait konflik dan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya. Desakan-desakan Malaysia tersebut juga menyiratkan bahwa isu Rohingya ini adalah isu yang serius. Malaysia menginginkan agar konflik ini cepat

⁵⁸ YB Dato' Sri Anifah Aman, "Special Address 'International Conference on Rohingya 2017' Theme: The Plight of Rohingya: Searching for Solutions", http://www.kln.gov.my/web/nam_windhoek/s2017/-/asset_publisher/ME2g/blog/special-address-%E2%80%98international-conference-on-rohingya-2017%E2%80%99-theme:-the-plight-of-rohingya:-searching-for-solutions?redirect=%2Fweb%2Fnam_windhoek%2Fs2017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ME2g%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_2hIE_column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_ME2g_keywords%3D%26_101_INSTANCE_ME2g_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_ME2g_andOperator%3Dtrue%26_101_INSTANCE_ME2g_delta%3D75%26, 17 Maret 2017, h. 1, dikunjungi pada tanggal 14 Agustus 2018.

berakhir dan tidak menimbulkan masalah yang lebih luas dan lebih buruk lagi kedepannya.

Myanmar menyatakan bahwa konflik Rohingya ini adalah urusan dalam negerinya dan seharusnya tidak boleh ada pihak manapun yang ikut mencampuri urusan dalam negeri Myanmar ini. Oleh karena itu dalam menanggapi desakan-desakan yang sudah dilakukan Malaysia, Myanmar beranggapan bahwa Malaysia terlalu mencampuri urusan dalam negeri mereka⁵⁹. Oleh karena Myanmar menganggap bahwa konflik Rohingya ini adalah urusan dalam negeri mereka, Myanmar mengingatkan kepada Malaysia untuk menghormati kedaulatan Myanmar⁶⁰.

Meskipun begitu, Pemerintah Myanmar mengakui bahwa konflik ini adalah masalah bagi negara mereka sehingga sudah mulai berinisiatif melakukan usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik Rohingya ini⁶¹. Pada bulan September tahun 2016, Daw Auang San Suu Kyi membentuk sebuah komisi bernama *Advisory Commision* yang bekerjasama dengan *Kofi Annan Foundation* terkait penyelesaian konflik di Rakhine. *Advisory Commision* berhasil mengeluarkan laporannya pada Agustus 2017 yang berisi berbagai rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan konflik ini. Desember 2016, pemerintah nasional Myanmar membentuk komisi yang bernama *Investigation Commision on Maungdaw in Rakhine State*, komisi ini ditugaskan untuk melakukan investigasi terkait berbagai situasi yang ada di

⁵⁹ Ira Astiana, 'Konflik Rohingya picu panasnya hubungan Myanmar-Malaysia', *merdeka.com* (online), 6 Desember 2016, <<https://www.merdeka.com/dunia/konflik-rohingya-picu-panasnya-hubungan-myanmar-malaysia-splitnews-2.html>>

⁶⁰ Praveen Menon, 'Malaysia says Myanmar violence against Muslim Rohingya "ethnic cleansing"', *Reuters* (online), 3 Desember 2016, <<http://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-malaysia-idUSKBN13S03K>>.

⁶¹ Astiana, *Loc.Cit.*

Rakhine. Kemudian Militer Myanmar juga membentuk tim investigasi terkait dengan tindakan militer di dalam konflik ini. Kepolisian Myanmar juga membentuk tim investigasi pada 12 Februari 2017 untuk melakukan investigasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran didalam konflik. Pada 13 Oktober 2017, Militer Myanmar kembali membentuk tim investigasi untuk menyelidiki tindak-tanduk militer didalam konflik yang pecah pada Agustus 2017. Pada akhir 2017, Pemerintah Myanmar membentuk komite yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait implementasi dari rekomendasi-rekomendasi yang terdapat pada laporan akhir dari *Advisory Commission on Rakhine State*⁶². Namun, dengan berbagai macam usaha-usaha seperti diatas, hingga bulan Desember tahun 2017 konflik di Rakhine yang dialami oleh etnis-etnis minoritas termasuk etnis Rohingya belum juga selesai ditandai dengan masih adanya gelombang pengungsi ke area perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh⁶³.

Akar permasalahan yang menyebabkan etnis Rohingya ini mengalami banyak kekerasan atas hak asasi mereka sebagai manusia adalah tentang status kewarganegaraan mereka. Kita tahu bahwa etnis Rohingya saat ini tidak diakui sebagai warga negara Myanmar dikarenakan tidak diakui didalam hukum kewarganegaraan Myanmar yang berlaku pada tahun 1982. Banyak pihak dalam masyarakat internasional seperti organisasi-organisasi non-pemerintah, bahkan termasuk aktivis-aktivis yang telah mendorong agar Pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan Myanmar kepada mereka agar konflik ini segera berakhir⁶⁴. Sebenarnya pada tahun 2016 dibentuk sebuah komisi yang bernama *The Pyidaungsu Hluttaw's Legal Affairs and Special Cases*

⁶² Human rights watch, *Myanmar's Investigative Commission: A History of Shielding Abuses*, 2018, h. 4-6.

⁶³ Inter Sector Coordination Group, *Situation Report: Rohingya Refugee Crisis*, Cox's Bazar 31 Desember 2017, h. 1.

⁶⁴ Kim, *Loc.Cit.*

Assessment Commission yang mana bertugas mengulas berbagai macam hukum-hukum yang ada di Myanmar. Terkait dengan hukum kewarganegaraan tahun 1982, komisi tersebut tidak menyentuh sedikitpun tentang hal itu. Kemudian, dari hal ini dapat diketahui bahwa hukum kewarganegaraan tahun 1982 dibiarkan begitu saja tanpa ada rencana untuk dilakukan amandemen⁶⁵. Hingga akhir tahun 2017, kesediaan Pemerintah Myanmar untuk melakukan amandemen terhadap hukum kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tersebut belum terealisasi. Padahal hal tersebutlah yang menjadi akar permasalahan dari berbagai macam kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya.

⁶⁵Aung Kyaw Min, 'Review of Citizenship Law spurs debate', *The Myanmar Times* (online), 8 September 2017, h. 1
<<https://www.mmmtimes.com/news/review-citizenship-law-spurs-debate.html>>.